

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini giat melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup di segala sektor salah satunya dibidang ekonomi. Pembangunan di sektor ekonomi diharapkan dapat mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh sehingga mampu berperan besar dalam lingkup perekonomian nasional. Dengan berkembangnya perekonomian suatu negara maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut bisa dibilang mumpuni untuk masuk jajaran ke dalam negara maju yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam mewujudkannya setiap daerah yang ada di Indonesia haruslah mempunyai perekonomian yang kuat pula karena pendukung utama majunya tiap-tiap daerah bisa dilihat dari tumbuhnya perekonomian daerah itu sendiri yang tercermin dalam PDRB.

Naiknya PDRB merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional (Deksa et al., 2022). PDB memiliki peran penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu tolak ukur pencapaian atau kemajuan. Sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi, PDB mencerminkan sejauh mana keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan

ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang tercermin dalam perubahan output nasional.

Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut. PDRB berperan sebagai tolak ukur utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terutama dalam aspek pengeluaran fiskal, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan PDRB di suatu daerah.

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian. Kebijakan ini mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata (Sari et al., 2024). Secara sederhana kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dapat mengendalikan ekonomi. Kebijakan fiskal yang bagus merupakan strategi yang berguna dalam membangun ekonomi suatu daerah.

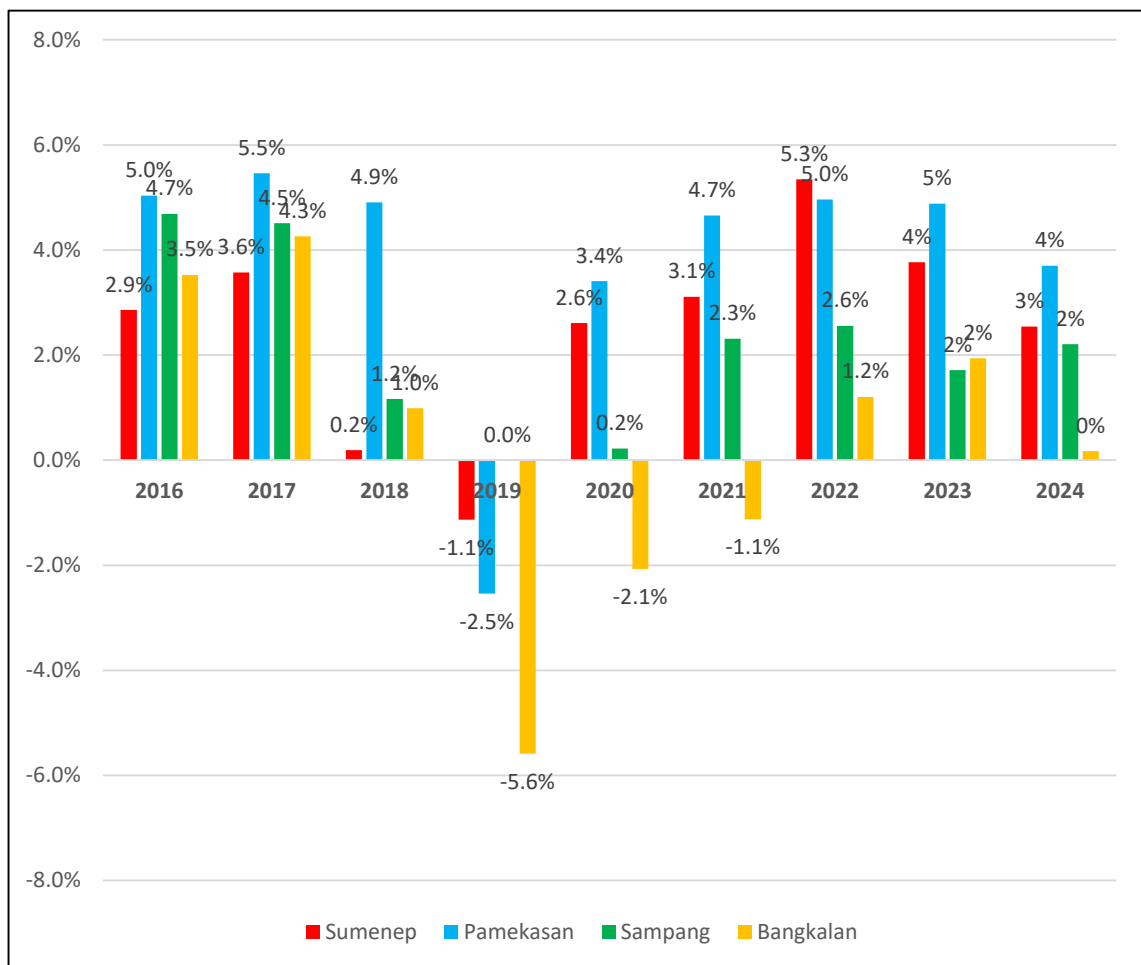
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendukung naiknya PDRB. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta pemberian insentif kepada sektor-sektor produktif. Dalam pandangan teori *keynesian*, peningkatan

pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada ketepatan alokasi anggaran dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, pertumbuhan ekonominya masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Malang. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kondisi ini adalah efektivitas serta efisiensi pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura mengalami fluktuasi. Beberapa kabupaten mengalami peningkatan PDRB yang signifikan, sementara yang lain mengalami perlambatan atau stagnasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah di setiap kabupaten memiliki dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana pengeluaran pemerintah memengaruhi PDRB di masing-masing kabupaten agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Karena pada tiap daerah memiliki kebijakan fiskal yang berbeda-beda dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah sehingga membuat kenaikan PDRB berbeda pula dari 4 kabupaten yang ada di Madura, seperti yang

ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Perkembangan PDRB empat Kabupaten di Madura Tahun 2016-2024

Sumber: DJPK, BPS dan Kabupaten Dalam Angka (diolah)

Dari data yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 di atas diketahui bahwa kenaikan PDRB melalui perhitungan atas dasar harga konstan di Madura pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia pada tahun 2020 sehingga membuat perekonomian terganggu. Kebijakan fiskal di Madura tidak sama di setiap daerahnya yang menyebabkan PDRB mengalami fluktuasi sehingga pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun berbeda-beda di setiap

Kabupatennya. Seperti pada tahun 2020-2021, PDRB Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan 2,6 persen dan Pamekasan naik 3,4 persen, Sampang yang pada tahun tersebut juga hanya mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen. Sedangkan di tahun yang sama Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan - 2,1 persen yang membuat pertumbuhan perekonomiannya berada di bawah Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Data tersebut menunjukkan perekonomian tidak selalu sama dalam satu Pulau, hal tersebut membuat PDRB memiliki urgensi yang menarik untuk diteliti karena perbedaan menunjukkan betapa beragamnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi PDRB adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menstabilkan harga dan tingkat produksi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan meningkatkan perekonomian menurut (Nasution, 2020) dalam (Syaputra et al., 2024:348). Belanja pemerintah dapat mencerminkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah per kapita yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan yang baik kepada penduduknya. Ini dapat mencakup fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang berkembang, dan dukungan sosial yang memadai. Namun, pengeluaran pemerintah yang tinggi juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah per kapita yang rendah dapat menunjukkan keterbatasan sumber daya atau prioritas yang berbeda dalam alokasi anggaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada penyediaan layanan dasar kepada masyarakat (Syaputra et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan erat

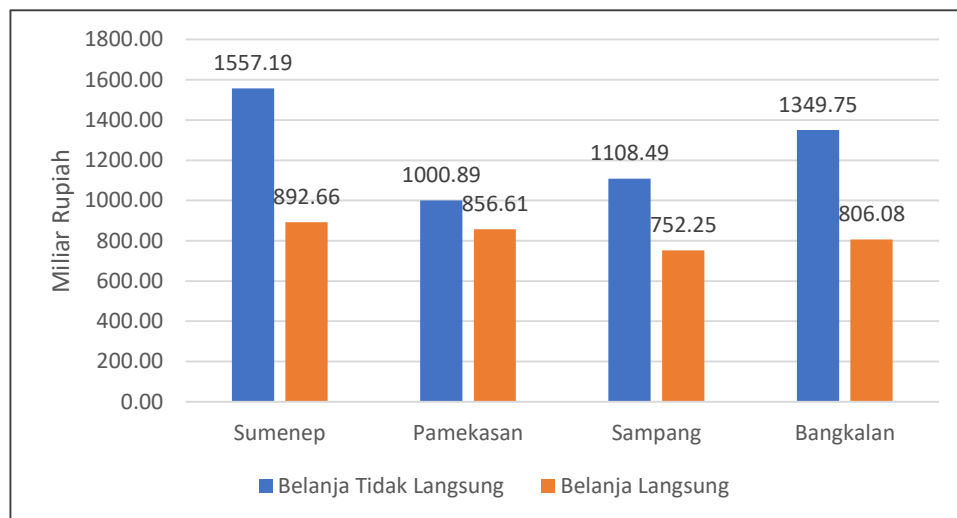
antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, tetapi hasil penelitian tersebut masih bervariasi di berbagai daerah. Di beberapa wilayah, peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDRB, sedangkan di daerah lain dampaknya lebih kecil akibat berbagai kendala, seperti inefisiensi birokrasi, atau alokasi anggaran yang kurang optimal. Oleh karena itu, diharapkan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat haruslah dimulai dengan kebijakan fiskal yang baik sehingga dapat menciptakan perekonomian yang bagus. Dalam menciptakan perekonomian yang baik dapat dengan mengelola belanja pemerintah sebaik mungkin karena manajemen pengeluaran sebaik dan seefisien mungkin dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Semakin besar pengeluaran pemerintah terutama yang produktif maka potensi peningkatan PDRB juga semakin besar, karena menambah aktivitas ekonomi secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan permintaan agregat terus naik dikarenakan faktor yang mempengaruhi permintaan agregat salah satunya adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 36 pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua macam, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Menurut Ayunda et al., (2024) tentang pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat di pakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang di biayai oleh pengeluaran pemerintah, hal tersebut merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menggambarkan betapa pentingnya menganalisis pengaruh antar variabel, karena dalam pengeluaran pemerintah merupakan komponen utama dalam perhitungan PDRB. PDRB sendiri dihitung dengan rumus pendekatan pengeluaran yang di dalamnya terdapat pengeluaran pemerintah. Menurut Koilam et al., (2023) menerangkan hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Dalam penelitian lain memberikan penjelasan bahwa pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap PDRB. Salah satu alasan utamanya adalah alokasi yang sangat kurang terhadap sektor-sektor yang mendukung produksi. Pengeluaran Pemerintah yang kurang optimal, terutama dalam hal belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, mengakibatkan dampak yang minimal terhadap peningkatan PDRB (Tamam & Hidayatullah, 2024). Kajian tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah bisa saja memiliki pengaruh ataupun tidak terhadap pertumbuhan PDRB tergantung dari jenis dan cara pengalokasiannya. Pengeluaran pemerintah di Madura juga tidak selalu sama antar daerah, dalam beberapa tahun terakhir pengeluaran pemerintah selalu berbeda-beda antara tahun 2016-2023. Hal tersebut menunjukkan bukan hanya pertumbuhan PDRB saja yang bisa fluktuatif, tetapi belanja pemerintah juga bisa

mengalami hal yang sama di Madura seperti yang ditunjukkan gambar berikut.



Gambar 1. 2 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah empat Kabupaten di Madura Satuan Miliar Rupiah Tahun 2016-2024

Sumber: DJPK, BPS dan Kabupaten Dalam Angka (diolah)

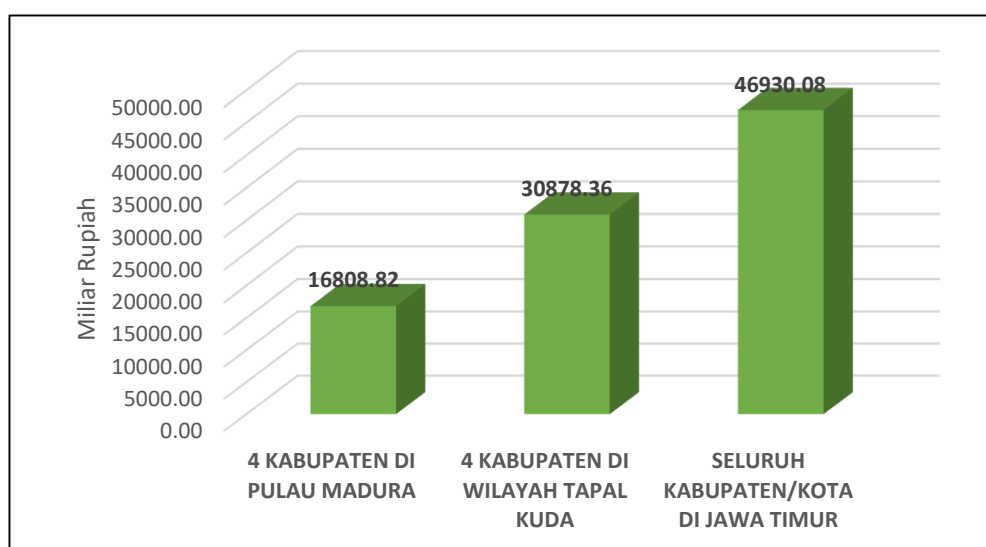
Pengeluaran pemerintah di Madura dari tahun 2016-2024 bervariasi setiap tahunnya, dari data gambar 1.2 di atas dapat dilihat dari empat kabupaten tidak semua sama pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti pada tahun 2019-2020, belanja pemerintah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada kabupaten Sumenep naik sebesar 11,6 persen jauh di atas dari tiga kabupaten lainnya yang ada di Pulau Madura, dan kabupaten pamekasan naik sekitar 5,6 persen. Tetapi beda halnya dengan kabupaten Sampang dan Bangkalan yang belanja pemerintahnya turun pada tahun yang sama. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan perbedaan kebijakan fiskal pada setiap daerah yang ada di pulau Madura, dalam pengelolaannya pengeluaran pemerintah bisa saja turun yang hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran pusat, defisit anggaran dan banyak hal lainnya bisa

menjadi faktor.

Dari data PDRB dan pengeluaran pemerintah empat kabupaten di Madura dari tahun 2016-2024 diketahui bahwa setiap daerahnya mengalami perbedaan, dan ketika kita bandingkan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB terdapat beberapa perbedaan. Seperti pada tahun 2019-2020 pertumbuhan PDRB di kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan mengalami penurunan tetapi pengeluaran pemerintah pada tahun yang sama di kabupaten Sumenep dan Pamekasan mengalami kenaikan pengeluaran. Dan di tahun 2021-2022 pertumbuhan PDRB kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang sama-sama mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah yang mengalami kenaikan belanja hanya di kabupaten Pamekasan dan Sampang sedangkan Sumenep yang pertumbuhan PDRB nya naik 3,1 persen pada tahun yang sama pengeluaran pemerintahnya turun yaitu sekitar -26,1 persen. Di sisi lain peneliti menemukan adanya fenomena seperti kurangnya infrastruktur yang dibangun, yang seharusnya dengan pembangunan fasilitas yang memadai hal itu dapat memuluskan laju perekonomian daerah. Belanja yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan juga seringkali menjadi pertanyaan besar apakah pengeluaran pemerintah dioptimalkan dengan benar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Madura. Karena dalam belanja modal mekanisme pembangunan infrastruktur sangatlah menentukan besarnya pengeluaran pemerintah sehingga hal tersebut haruslah berguna agar PDRB naik dan masyarakat dapat lebih mudah dalam menggunakan fasilitas yang ada demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum.

Dalam penjelasan teori keynesian jika pengeluaran pemerintah naik hal tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi pada studi kasus ini

tidak selalu demikian yang menimbulkan pertanyaan besar tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan PDRB. Penelitian ini memiliki urgensi penting untuk mengembangkan kajian di sektor pertumbuhan ekonomi karena berdasarkan kejadian yang sudah dijelaskan fenomena tersebut mendasari tentang ketidaksesuaian antara teori dan realita yang membuatnya menarik untuk dibahas.



Gambar 1.3 Perbandingan Rata-Rata PDRB Madura dan Wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur Satuan Miliar Rupiah Tahun 2016-2024

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka (diolah)

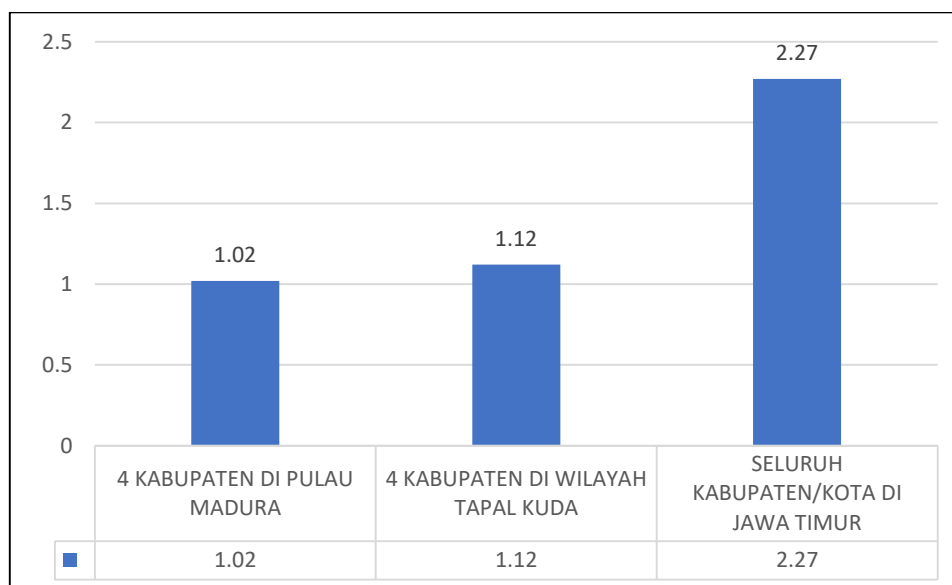
Ketimpangan pembangunan ekonomi antarsektor dan antarwilayah masih menjadi isu krusial dalam perekonomian regional Provinsi Jawa Timur. Seperti pada gambar 1.3 di atas berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2024), Produk Domestik Regional Bruto riil di empat kabupaten Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) mencatatkan nilai rata-rata sebesar 16.808,82 miliar. Capaian tersebut berada jauh di bawah rata-rata PDRB kabupaten di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur (Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo) yang menyentuh 30.878,36 miliar rupiah, serta terpaut

signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 46.930,08 miliar rupiah. Disparitas ini menunjukkan bahwa kapasitas perekonomian empat kabupaten di Pulau Madura baru menyerap sekitar 54,44% dari rata-rata output ekonomi sub-koridor Tapal Kuda dan hanya menyumbang 35,82% terhadap rata-rata perekonomian daerah di Jawa Timur.

Kesenjangan output perekonomian daerah secara teoretis dipengaruhi oleh intervensi kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Todaro & Smith, 2020). Dalam struktur fiskal daerah, Belanja Langsung yang mencakup belanja modal dan pembangunan memegang peranan krusial sebagai stimulator investasi serta penyedia sarana-prasarana publik untuk menggerakkan sektor produktif. Di sisi lain, Belanja Tidak Langsung seperti belanja pegawai dan hibah beroperasi sebagai instrumen penjaga daya beli masyarakat melalui dampak pengganda fiskal (*fiscal multiplier effect*). Namun, pengalokasian APBD di empat kabupaten Pulau Madura kerap dihadapkan pada ketimpangan proporsi, di mana porsi Belanja Tidak Langsung cenderung mendominasi dibandingkan Belanja Langsung yang berdampak nyata terhadap pembentukan modal tetap bruto dan akselerasi PDRB. Oleh karena itu, penelitian mengenai sejauh mana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berkontribusi dalam mendorong PDRB di empat kabupaten Pulau Madura menjadi penting untuk diuji secara empiris guna menjawab permasalahan kesenjangan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Instrumen fiskal berupa APBD menjadi penggerak utama aktivitas perekonomian di tingkat lokal. Pengeluaran langsung dialokasikan untuk mendanai infrastruktur dasar, proyek pembangunan, serta investasi publik. Di

pihak lain, pengeluaran tidak langsung diserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional administrasi pemerintahan. Titik krusial dari dinamika ini berada pada sejauh mana efektivitas proporsi pengeluaran anggaran tersebut. Pengelolaan belanja publik di empat kabupaten Pulau Madura belum memberikan dampak nyata terhadap kenaikan PDRB. Tingginya porsi pengeluaran tidak langsung yang menutupi alokasi belanja langsung menahan munculnya *multiplier effect* bagi sektor riil (Sukirno, 2019). Dampaknya, penggunaan dana APBD belum memicu pembentukan nilai tambah ekonomi sekuat Sidoarjo atau Banyuwangi. Fenomena ini mempertegas jurang ketimpangan capaian ekonomi antarwilayah di Jawa Timur.



Gambar 1. 4 Rata-rata Kontribusi PDRB Madura dan Wilayah Tapal Kuda Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2024

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka (diolah)

Dari data pada gambar 1.4 rata-rata kontribusi PDRB menunjukkan ketimpangan struktur perekonomian yang tajam antarwilayah di Jawa Timur menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, empat kabupaten

di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) mencatatkan rata-rata kontribusi sebesar 1,02% terhadap total PDRB Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan empat kabupaten di wilayah Tapal Kuda (Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo) yang memiliki rata-rata kontribusi 1,12%, posisi perekonomian Madura relatif seimbang namun masih berada sedikit di bawahnya dengan selisih 0,10%. Akan tetapi, ketimpangan struktur ekonomi menjadi sangat mencolok ketika kedua kelompok wilayah tersebut disandingkan dengan rata-rata kontribusi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencapai 2,27%. Perekonomian empat kabupaten di Pulau Madura tercatat kurang dari separuh (sekitar 44,93%) dari rata-rata kontribusi daerah di tingkat provinsi, yang mengindikasikan belum optimalnya akselerasi pembentukan output perekonomian di kawasan Kepulauan Madura (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024).

Lambatnya kontribusi output daerah ini secara teoritis berkaitan erat dengan peran ekspansi fiskal melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Arsyad, 2010). Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, keterbatasan agregat PDRB di wilayah terpencil (*lagging regions*) memerlukan stimulus belanja daerah yang produktif dan efisien (Capello, 2016). Alokasi Belanja Langsung yang difokuskan pada infrastruktur fisik dan modal publik berfungsi sebagai penggerak utama investasi swasta dan kapasitas produksi masyarakat (Kuncoro, 2014). Sementara itu, Belanja Tidak Langsung seperti belanja pegawai dan transfer sosial bertindak menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga melalui efek pengganda fiskal (Mankiw, 2019). Struktur alokasi anggaran yang belum proporsional di empat kabupaten Pulau Madura disinyalir belum mampu menghasilkan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang optimal

terhadap PDRB. Oleh karena itu, pengujian empiris mengenai sejauh mana pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap PDRB empat kabupaten di Pulau Madura menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam penelitian ini.

Rendahnya sumbangan PDRB empat kabupaten di Pulau Madura mencerminkan lambatnya akumulasi nilai tambah ekonomi di kawasan tersebut (Todaro & Smith, 2020). Alokasi belanja daerah melalui APBD belum mampu memicu lompatan produktivitas yang setara dengan wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah daerah di Madura diduga belum optimal dalam menciptakan efisiensi agregat bagi sektor-sektor penggerak utama tingginya ketimpangan kontribusi ini memperlihatkan adanya masalah efektivitas instrumen fiskal daerah. Pembentukan modal dan belanja pembangunan belum memberikan dorongan agregat yang cukup untuk mengikis jurang disparitas ekonomi antarwilayah (Sukirno, 2019).

Selain itu, periode 2016–2024 menjadi kajian yang menarik karena bervariasinya pada pertumbuhan PDRB maupun pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian daerah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah di Pulau Madura kemungkinan mengalami perubahan kebijakan fiskal untuk mengatasi dampak dari berbeda-bedanya kenaikan ekonomi yang ditimbulkan. Perbedaan ini dapat memengaruhi alokasi anggaran dan efektivitas belanja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan PDRB. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana pengeluaran pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan PDRB di tengah perbedaan kenaikan belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten di Pulau Madura selama periode 2016–2024. Penelitian ini difokuskan pada variabel pengeluaran pemerintah karena pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah dan peningkatan PDRB sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynes. Dengan memahami hubungan ini, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan dapat memberikan wawasan seputar keterpengaruhan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja langsung dan tidak langsung yang dialokasikan dengan kebijakan fiskal masing-masing daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap PDRB?
2. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk :

1. Pemerintah Terkait

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah di Pulau Madura untuk mengkaji pentingnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggarkan ke dalam program-program pemerintah.

2. Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa dikemudian hari.

3. Peneliti

Penelitian ini adalah wujud nyata dari penerapan teori-teori yang di dapat dibangku kuliah serta sebagai wahana untuk memperluas keilmuan.